

KONFERENSI INTER-INDONESIA TAHUN 1949: WUJUD KONSENSUS NASIONAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN *BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG*

Widhi Setyo Putro

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya Cilandak Jakarta Selatan

Alamat korespondensi: widhi_sp@yahoo.com

Diterima/ *Received*: 24 Januari 2018; Disetujui/ *Accepted*: 30 Maret 2018

Abstract

This article discusses the national consensus between the Republic of Indonesia (RI) and the Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) which embodied in the 1949 Inter-Indonesia Conference. Using conflict and consensus theory of Ralf Dahrendorf, this article seeks to understand the conflicts of interest background and the process towards a consensus between RI and BFO. Conflict between RI and BFO motivated by the Dutch aimed to control Indonesia. One of his efforts was to divide the Indonesian nation by forming states, which led to a conflict between the Republicans (Republicans) who supported the united state, and the federalists (BFO) in favor of the federal state. The study found that the Dutch federal policy was not entirely a success because the federalists which incorporated in BFO was not affected. The conflict between the Republican and federalists subsided with the implementation of the Goodwill Mission and the sending of the BFO Liaison Commission to meet Indonesian leaders detained after the Dutch Military Aggression II. The summit was a national consensus between RI and BFO, it embodied in the Inter-Indonesia Conference in 1949 which took placed at Yogyakarta and Jakarta. They reached a consensus by agreeing on fundamental issues as the identity of a sovereign state, such as the name of the country, Merah Putih as the official flag, Bahasa Indonesia as the official language, and the Indonesia Raya as the national anthem.

Keywords: *Inter-Indonesia Conference; Consensus; Republicans; Federalists; BFO.*

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang konsensus nasional antara Republik Indonesia (RI) dengan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang diwujudkan dalam Konferensi Inter-Indonesia pada 1949. Melalui penggunaan teori konflik dan konsensus dari Ralf Dahrendorf, artikel ini berupaya memahami latar belakang konflik kepentingan dan proses menuju konsensus antara RI dengan BFO. Konflik atau pertentangan antara RI dengan BFO dilatarbelakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Salah satu usahanya adalah memecahbelah bangsa Indonesia dengan membentuk negara-negara bagian, yang memunculkan pertentangan antara kaum republikan (RI) yang mendukung negara kesatuan dengan kaum federalis (BFO) yang mendukung negara federal. Penelitian ini menemukan bahwa politik federal yang dilakukan Belanda tidak sepenuhnya berhasil, karena para kaum federalis yang tergabung dalam BFO tidak semuanya dapat dipengaruhi oleh Belanda. Pertentangan antara kaum republikan dan federalis mereda dengan terlaksananya *Goodwill Mission* dan pengiriman Komisi Penghubung BFO untuk menemui pemimpin RI yang ditahan oleh Belanda setelah Agresi Militer Belanda II. Puncaknya adalah konsensus nasional antara RI dengan BFO yang diwujudkan dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta pada 1949. Mereka mencapai konsensus dengan menyepakati hal-hal yang mendasar sebagai identitas negara berdaulat, seperti nama negara, yaitu Republik Indonesia Serikat, bendera Merah Putih sebagai bendera resmi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan lagu *Indonesia Raya* sebagai lagu kebangsaan.

Kata Kunci: Konferensi Inter-Indonesia; Konsensus; Republikan; Federalis; BFO.

PENDAHULUAN

Periode 1945-1949 atau yang biasa disebut sebagai periode revolusi kemerdekaan, selalu menarik untuk dikaji melalui penelitian sejarah. Pada periode ini diwarnai dengan perjuangan melawan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Usaha Belanda untuk menguasai Indonesia dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui cara militer. Agresi Militer I tahun 1947 serta Agresi Militer II pada 1948 menjadi buktinya.

Untuk mendukung cara militer, Belanda juga menggunakan cara politik. Salah satunya adalah *divide et empire* dengan model baru yaitu pembentukan negara-negara bagian. Pada Desember 1946 usaha itu dapat terwujud dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang disahkan dalam Konferensi Denpasar. Pembentukan NIT bisa dikatakan sebagai awal dari lahirnya negara-negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, dan Negara Sumatra Selatan.

Akan tetapi tujuan dari Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Negara-negara bagian yang kemudian membentuk organisasi bernama *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), tidak pernah berhasil dijadikan alat oleh Belanda untuk menghancurkan eksistensi Republik Indonesia (RI). Hubungan baik antara RI dengan BFO kemudian mencapai puncaknya pada sebuah peristiwa penting yang dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia.

Konferensi Inter-Indonesia merupakan sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam usaha bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan. Peristiwa ini banyak dikecilkan peranannya jika dibandingkan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejatinya, perundingan delegasi RI dan BFO menghadapi Belanda dalam KMB tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada konsensus yang dihasilkan dalam Konferensi Inter-Indonesia baik di Yogyakarta maupun di Jakarta.

Selama ini kajian tentang Konferensi Inter-Indonesia hingga penyusunan penelitian ini belum ditemukan. Konferensi tersebut hanya

dibahas sekilas di dalam beberapa pustaka yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI melalui jalur-jalur diplomasi salah satunya karya Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville* (1991) dan George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik* (1995).

Karya R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, merupakan salah satu rujukan penting yang telah ada. Buku ini merupakan hasil riset mendalam atas berbagai data-data terbaru mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan ini timbul kekuatan ketiga selain RI dan Belanda, yaitu BFO atau Perhimpunan Musyawarah Federal. BFO telah memberi kontribusi salah satunya ide pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia dari Anak Agung Gde Agung.

Sementara itu, kajian yang dilakukan Vickers (2013) berfokus pada kontestasi yang terjadi dalam masa revolusi mengenai bentuk negara. Penyelesaiannya kemudian dicapai dengan proses diplomasi pada 27 Desember 1949 dengan keputusan mengenai bentuk negara federal Indonesia, yang dianggap mengintegrasikan corak republik dengan negara-negara koloni Belanda. Lebih lanjut, periode 1949 merupakan periode yang memunculkan struktur kolonial yang tidak dapat diterima bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai dampaknya, periode itu dianggap memiliki konotasi buruk dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, melalui kajian ini penulis ingin menggali serta memaknai kembali arti penting Konferensi Inter-Indonesia dalam perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatannya dan sebagai wujud dari proses integrasi nasional.

Berdasar uraian di atas ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas. Pertama, kondisi politik dan keamanan di Indonesia pada tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan hingga berlangsungnya penyerahan kedaulatan melalui KMB pada tahun 1949. Kedua, penerapan politik federal oleh Belanda sebagai cara untuk menghadapi RI. Ketiga, alasan dan proses adanya konsensus nasional di

antara pihak RI dengan BFO serta peranannya dalam mengakhiri konflik Indonesia-Belanda.

Artikel ini disusun dengan menerapkan teori tentang konsensus. Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Peran konsensus diajukan sebagai dasar pijakan pemikiran dalam menyelesaikan sebuah konflik. Berbagai kebijakan yang diambil untuk menengahi konflik berasal dari hasil kesepakatan kedua belah pihak yang berseberangan lewat suasana dialog. Oleh karena itu, menurut Dahrendorf, tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik dan tidak berkonsensus. Sebab konflik dan konsensus merupakan syarat terjadinya suatu masyarakat (Ritzer & Goodman, 2008).

METODE

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis untuk memberi bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah (Notosusanto, 1978: 11). Adapun jenis-jenis sumber yang digunakan adalah arsip, koran dan majalah sezaman, serta buku yang relevan. Arsip yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia, sedangkan koran dan majalah sezaman merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikritik untuk mendapatkan fakta sejarah yang kredibel. Fakta-fakta itu kemudian diinterpretasikan berdasar kronologi dan hubungan kausalitas, sehingga dihasilkan hubungan fakta yang memiliki makna. Akhirnya, disusunlah sebuah kisah sejarah.

KONDISI POLITIK-KEAMANAN INDONESIA 1945-1949

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai berdirinya negara Republik Indonesia (RI) yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, Belanda tidak pernah

mengakui kemerdekaan RI dan berusaha untuk berkuasa kembali. Mereka tetap yakin sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan 'sah' di Indonesia setelah Jepang menyerah. Atas dasar itulah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) ikut serta dengan tentara Sekutu mendarat di Tanjung Priok pada September 1945 (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 120).

Kedatangan pasukan Sekutu yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, mempertahankan keadaan damai dan menghimpun keterangan tentang penjahat perang untuk selanjutnya dituntut di pengadilan. Pihak Indonesia pun pada awalnya bersikap netral, tetapi kondisi tersebut berubah ketika NICA mempersenjatai kembali orang-orang *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL) yang baru dilepaskan dari tawanan. Bentrokan-bentrokan senjata antara pihak Sekutu, Belanda dengan rakyat Indonesia akhirnya tidak dapat dihindari. Di dalam menghadapi keinginan Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, RI menerapkan dua strategi perjuangan yaitu perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi/perundingan.

Pada 14 April 1946 dilakukan perundingan untuk pertama kali di Hoge Valuwe, Belanda (Soemarsono, 1978: 123). Namun, perundingan ini menemui kebuntuan, karena Belanda hanya bersedia mengakui Republik Indonesia secara *de facto* atas Jawa dan Madura. Sementara itu, di pihak Indonesia menuntut pengakuan *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra (Lapian & Drooglever, 1992: 3). Pada 7 Oktober 1946, delegasi Belanda dan Indonesia mulai berunding kembali. Pihak Belanda dipimpin oleh W. Schermerhor dan pihak Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir, sebagai perantara adalah Lord Killearn dari Inggris. Perundingan yang kemudian dikenal dengan Persetujuan Linggarjati itu ditandatangani pada 25 Maret 1947, yang terdiri dari 17 pasal yang pokok-pokoknya antara lain; (1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Sumatra, Jawa,

dan Madura; (2) Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda bersama-sama akan menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federasi yang disebut Negara Indonesia Serikat; (3) Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan tetap bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam bentuk Uni Indonesia Belanda (Roem, 1977: 56-61).

Kesepakatan di Linggarjati kemudian dilanggar oleh Belanda dengan melancarkan agresi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947. Agresi Militer Belanda pertama tersebut membawa Indonesia-Belanda kembali ke meja perundingan dengan perantara Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas usul Amerika Serikat (ANRI, Kementerian Penerangan 1945-1949 No. 232). KTN sendiri terdiri dari Richard Kirby dari Australia yang dipilih oleh Indonesia, Paul van Zeeland dari Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Frank Graham yang dipilih oleh kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda (Sekretariat Negara, 1981: 155).

Perundingan selanjutnya dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat "USS. Renville" dan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville terdiri atas tiga bagian adalah sebagai berikut: (1) Persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi van Mook; (2) Kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN; (3) Enam pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak Negara Indonesia Serikat (Tobing, 1986).

Rencana pembentukan Negara Indonesia Serikat ditetapkan akhir 1948 dan meliputi seluruh Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatra (wilayah RI). Persoalannya adalah bagaimana membentuk pemerintah peralihannya. Perundingan kembali mengalami *deadlock* karena Pemerintah RI menolak pembentukan tentara federal yang menggabungkan TNI dengan KNIL (Leirissa, 1985: 104).

Macetnya perundingan tersebut memaksa Belanda untuk menggunakan kembali cara

militer. Agresi Militer II dilancarkan ke Ibu Kota RI Yogyakarta pada 18 Desember 1948. Para pemimpin RI seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Haji Agus Salim ditahan oleh Belanda dan diasingkan ke Prapat dan Bangka. Sementara itu, Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit mengungsi ke luar Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya terhadap Belanda. Untuk mempertahankan pemerintahan RI, dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat dan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Serangan Belanda ke Yogyakarta dan penahanan sejumlah pemimpin RI telah menimbulkan reaksi dunia internasional. Mereka mengutuk agresi Belanda yang melanggar perjanjian Renville dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh KTN. Selain itu, Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan kesatuan-kesatuan militer di Yogyakarta telah menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 28 Januari 1949, yang memerintahkan sebelum tanggal 1 Januari 1950, kedaulatan harus diserahkan kepada Indonesia (ANRI, Sekretariat Negara 1940-1949, No. 850).

Tekanan politik internasional tersebut memaksa Belanda untuk kembali berunding dengan Indonesia. Pada 7 Mei 1949 dilakukan perundingan dari pihak RI diwakili oleh Moh. Roem sedangkan Belanda diwakili oleh van Roijen di Hotel *des Indes*, Jakarta. KTN yang selanjutnya berubah menjadi *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) menjadi mediator dalam perundingan tersebut yang melahirkan Pernyataan Roem-Roijen dengan isi pokok sebagai berikut: (1) Menghentikan perang gerilya dan pengembalian pemimpin-pemimpin RI ke Yogyakarta; (2) Kerja sama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban-keamanan; (3) Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat; (3) Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat (Sekretariat Umum KMB, 1949: 137-139). Setelah tercapainya persetujuan Roem-Roijen, maka langkah selanjutnya adalah persiapan menuju

KMB di Den Haag untuk penyerahan kedaulatan.

POLITIK FEDERAL BELANDA DAN PEMBENTUKAN BFO

Baik Persetujuan Linggarjati, maupun Persetujuan Renville mengakui asas federal untuk membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia. RI yang mempunyai kekuasaan *de facto* atas Jawa, Madura, dan Sumatra, bersama-sama dengan Pemerintah Belanda akan membentuk sebuah negara demokratis yaitu Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara bagian RI, Indonesia Timur dan Kalimantan yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, pada kenyataannya, Belanda berusaha membentuk negara bagian lain, di luar perjanjian tersebut.

Konferensi Malino yang berlangsung dari 15-25 Juli 1946 menjadi langkah awal politik federal Belanda. Di dalam pidato pembukaannya, van Mook menjelaskan tujuan konferensi adalah mengajak daerah-daerah luar Jawa-Madura (wilayah RI) untuk ikut serta dalam pembentukan ketatanegaraan di Indonesia dan juga terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan politik dengan Pemerintah Belanda (Agung, 1991: 179).

Untuk menindaklanjuti Konferensi Malino, maka diadakan sejumlah konferensi di daerah lain, antara lain Konferensi Pangkal Pinang (1-12 Oktober 1946), Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946), dan Konferensi Jawa Barat (berlangsung tiga kali dimulai dari Oktober 1947 dan yang terakhir 5 Maret 1948). Negara-negara bagian pun akhirnya terbentuk antara lain Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan sejumlah daerah otonomi.

Kemudian untuk memudahkan koordinasi antarnegara bagian dibentuklah Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal atau *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) pada 15 Juli 1948. Tokoh yang terpilih sebagai Ketua BFO adalah Tengkoeh Bahriun (Negara Sumatra Timur), Wakil Ketua I Mohammad Hanafiah (Banjar), Wakil Ketua II Sultan Hamid II

(Kalimantan Barat), dan Sekretaris Mr. A.J. Vleer (Leirissa, 2006: 121).

USAHA AWAL KONSENSUS RI – BFO

Tujuan dari politik federal Belanda adalah untuk tetap mengendalikan Indonesia dengan menggunakan negara-negara bagian bentukannya. Negara-negara bagian yang kemudian tergabung dalam BFO tersebut didorong untuk memiliki sikap berbeda dari Pemerintah RI dalam menjalankan garis-garis politiknya. Lebih dari itu, agenda yang tersembunyi dari Belanda adalah menghilangkan eksistensi RI. Hal itu terbukti dengan keinginan penyerahan kedaulatan tanpa mengikutsertakan RI.

Politik federal yang diterapkan Belanda berhasil memunculkan pertentangan antara kaum republikan (pendukung RI) dengan kaum federalis (pendukung BFO). Di wilayah-wilayah BFO, Belanda selalu mengemukakan bahwa RI adalah topeng imperialis Jawa guna menguasai golongan-golongan Bangsa Indonesia lainnya. Antitesa federalis-republikan selalu dibesar-besarkan bahkan di dunia internasional. Belanda berdalih harus melindungi kepentingan-kepentingan kaum federalis yang diancam imperialisme republican (*Mimbar Indonesia*, 12 Maret 1949). Sebaliknya, di pihak RI menganggap bahwa negara-negara yang tergabung dalam BFO merupakan negara boneka bentukan Belanda untuk mendukung kolonialisme Belanda.

Pada perkembangannya, pertentangan antara kaum republikan dengan federalis menjadi semakin berkurang. Hal itu karena perubahan politik yang terjadi di dalam kelompok federalis. Salah satunya adalah pengangkatan Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT). Ia selalu menginginkan adanya persatuan sesama bangsa Indonesia termasuk dalam menyelesaikan pertikaian RI-Belanda. Upaya mengurangi pertentangan untuk mencapai konsensus antara golongan republikan dengan golongan federalis mulai dirintis oleh Anak Agung Gde Agung pada 18 Februari 1948, yaitu dengan mengirimkan *Goodwill Mission* NIT ke Yogyakarta.

Para anggota *Goodwill Mission* diterima secara resmi oleh para pemimpin RI di Istana Kepresidenan. Selama di Yogyakarta, para anggota *Goodwill Mission* mendapat kesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan RI untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. Selain itu, mereka juga bebas menemui golongan-golongan dan tokoh-tokoh yang ingin dijumpai. *Goodwill Mission* berada di Yogyakarta hingga 29 Februari 1948 (Agung, 1985: 373). Keberhasilan *Goodwill Mission* NIT berkunjung ke Yogyakarta menjadi 'jembatan' yang menghubungkan kedua Negara untuk menjalin kerja sama lebih lanjut.

Usaha mencapai konsensus nasional dilanjutkan setelah terbentuknya BFO. Pada 15 Januari 1949, BFO mengadakan rapat untuk membentuk suatu komisi penghubung yang bertugas mengadakan perundingan-perundingan secara 'informal' dengan tokoh-tokoh pemimpin RI yang sedang diasingkan di Bangka pasca-Agresi Militer Belanda II. Komisi penghubung dipimpin oleh Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung dan diterima oleh Sukarno, Hatta, Leimena, dan H. Agoes Salim pada 7 Februari 1949. Pada akhir pertemuan diputuskan bahwa akan diadakan perundingan kembali untuk membicarakan situasi politik Indonesia pada umumnya (Agung, 1991: 225).

Pada 2 Maret 1949, diberangkatkan kembali komisi penghubung ke Muntok (Bangka) yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua BFO, Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung bersama Mr. Djumhana (Pasundan), Dr. Ateng (Jawa Timur), Kaliasyah Sinaga (Sumatra Timur), dan Abdul Rivai (Banjar). Tokoh-tokoh yang hadir dari pihak RI yaitu Sukarno dan Hatta disertai Mr. Asaat, Dr. Leimena, H. Agus Salim, Mr. Roem, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Mr. Abdul karim Pringgodigdo, dan Mr. Sujono (Agung, 1985: 515).

Pihak BFO dalam kesempatan itu menjelaskan kepada RI bahwa dalam mencari penyelesaian Indonesia, BFO menghendaki adanya suatu kerja sama yang erat dengan RI. Di dalam hal ini telah disadari bahwa hanya melalui konsensus nasional di antara semua pihak di seluruh Indonesia akan dapat tercapai cita-cita

kebangsaan seluruh rakyat Indonesia, yaitu pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.

KONFERENSI INTER-INDONESIA

Pada 14 April 1949 BFO mengadakan rapat untuk membahas rencana penyerahan kedaulatan Belanda kepada bangsa Indonesia dan untuk menindaklanjuti hasil kerja Komisi Penghubung. Di dalam rapat itu, Anak Agung Gde Agung kembali mengajukan gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang mempertemukan pihak RI dengan BFO dalam rangka menyongsong KMB. Tujuannya adalah untuk menyamakan pandangan dari pihak RI dan BFO untuk menghadapi Pemerintah Belanda dalam KMB. Pertemuan ini kemudian dikenal sebagai Konferensi Inter-Indonesia (Agung, 1985: 560).

Sebagai tindak lanjut, Ketua BFO mengirim Mr. Kosasih Purwanegara ke Yogyakarta untuk melakukan koordinasi dengan pihak RI mengenai teknis pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia. Akhirnya, dicapai kesepakatan bahwa Konferensi Inter-Indonesia akan dilangsungkan dua kali yang pertama di Yogyakarta pada 20 - 22 Juli, kemudian diteruskan di Jakarta pada 31 Juli - 2 Agustus. Pada kesempatan yang sama, pihak RI juga menyusun panitia pelaksana Konferensi Inter-Indonesia I yang dipimpin oleh Mr. Tadjuddin Noor, sedangkan tempat yang dipilih untuk pelaksanaan adalah Gedung Kepatihan (*Merdeka*, 18 Juli 1949; *Sekretariat Negara 1945-1949*, No. 855).

Pada 20 Juli 1949, Konferensi Inter-Indonesia I akhirnya resmi dibuka. Pidato pembukaan diawali oleh Ketua Panitia Tadjudin Noor, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Delegasi RI Mohammad Hatta, Ketua BFO Sultan Hamid II, dan ditutup oleh pidato Presiden Sukarno. Berikut ini adalah petikan pidato Hatta:

"Saudara-saudara, bagi saya bukanlah tercapai persesuaian dalam segala hal yang penting pada Konferensi Inter-Indonesia ini, melainkan Konferensi Inter-Indonesia ini penting karena ia adalah suatu saat bersejarah dalam hidup kita. Konferensi

Inter-Indonesia ini adalah suatu simbol daripada persatuan kita kembali, simbol dari kemauan kita untuk melaksanakan cita-cita rakyat kita dalam perjuangan yang berpuluh-puluh tahun, yaitu melaksanakan Indonesia yang bersatu dan tak terpisahkan. Di sini terletak arti yang sebenarnya daripada Konferensi Inter-Indonesia. Kita yang menjadi penyelenggara di sini barangkali belum dapat merasakan sedalam-dalamnya akan arti pertemuan kita di sini, tetapi ahli sejarah kemudian hari akan lebih dalam meninjau makna dan arti kejadian itu dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia.” (Leirissa, 2006: 275-276).

Pada sore harinya, diadakan rapat tertutup di Hotel Tugu. Dalam rapat yang dihadiri oleh delegasi RI dan BFO itu, dibicarakan mengenai peraturan konferensi dan pembentukan panitia-panitia. Kepanitiaan yang dibentuk antara lain: Panitia Pengarah (*Steering Committee*), Panitia Ketatanegaraan, Panitia Keuangan dan Ekonomi, Panitia Keamanan, serta Panitia Kebudayaan (Sekretariat Negara 1945-1949, No. 1035). Panitia-panitia tersebut mulai bekerja pada 21 Juli 1949 dan keesokan harinya mereka mulai mempresentasikan hasil kerja mereka.

Pada 22 Juli 1949, setiap panitia menyampaikan laporannya, kecuali Panitia Kebudayaan yang memang belum melakukan rapat kerja. Hasil yang dicapai oleh setiap kepanitiaan dalam Konferensi Inter-Indonesia I kemudian dirumuskan oleh *Steering Committee*. Hasilnya adalah 18 pasal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, yang merupakan syarat terbentuknya sebuah negara yang akan diserahkan kedaulatan oleh Belanda. Pasal-pasal tersebut juga memberikan hak demokrasi bagi warganya melalui pemilu dan juga tidak lupa persoalan ekonomi serta keamanan (Sekretariat Negara 1945-1949, No. 855).

Penyampaian hasil kerja dari masing-masing kepanitiaan pada 22 Juli 1949 menandai berakhirnya sidang Konferensi Inter-Indonesia I. Masalah-masalah yang belum terselesaikan kemudian dibicarakan dalam Panitia Teknis dan hasilnya akan disampaikan dalam rapat pleno Konferensi Inter-Indonesia II.

Pada 31 Juli-2 Agustus 1949 diselenggarakan Konferensi Inter-Indonesia II di Jakarta. Tempat pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia II adalah di Gedung Indonesia Serikat yang sehari-hari dijadikan sebagai kantor sekretariat BFO. Setelah pembukaan, agenda hari pertama adalah rapat pleno untuk membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Pada kesempatan itu, Sultan Hamid II selaku ketua sidang mengumumkan susunan keanggotaan yang baru untuk Panitia Kebudayaan, Panitia Kenegaraan, serta Panitia Ekonomi dan Keuangan (Leirissa, 2006: 297).

Pada 1 Agustus 1949, masing-masing kepanitiaan mengadakan rapat untuk membahas mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan wewenangnya. Keesokan harinya, rapat yang diadakan oleh masing-masing kepanitiaan dilanjutkan kembali. Terdapat kenyataan bahwa semua masalah yang belum terselesaikan dalam Konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta dapat dicarikan jalan keluarnya.

Hasil rapat dari berbagai kepanitiaan yang berupa rekomendasi kemudian diserahkan kepada *Steering Committee* untuk diformulasikan menjadi hasil akhir Konferensi Inter-Indonesia II. Beberapa keputusan penting dari Konferensi Inter-Indonesia II ini antara lain pada bagian ketatanegaraan disepakati bendera, bahasa dan lagu kebangsaan RIS, yaitu sang merah putih, bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya. Pada bagian ekonomi, disepakati penggunaan satu alat pembayaran yang sah dan impor-ekspor harus diatur secara sentral. Sementara pada bagian keamanan disepakati pembentukan APRIS, TNI sebagai inti APRIS, pertahanan negara menjadi urusan Pemerintah RIS, dan negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri (ANRI, Moh. Yamin, No. 70).

Tepat pada 2 Agustus pukul 18.30 Sultan Hamid II selaku Ketua BFO dan Ketua Konferensi Inter-Indonesia II membuka sidang penutup, ia menyampaikan:

“...terimakasih bukan hanya karena harapan dan kepercayaan bahwa pertemuan ini kan berhasil telah terbukti, tetapi juga telah membuktikan dan memperlihatkan kepada pihak luar bahwa kita bersatu dalam

cita dan tujuan. Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan..." (Merdeka, 3 Agustus 1949).

SIMPULAN

Konferensi Inter-Indonesia I dan II menjadi perwujudan adanya sebuah konsensus nasional. Konsensus dari seluruh para pemimpin RI dan BFO dalam menyusun kehidupan bernegara di masa depan. Hal itu ditunjukkan dengan disepakatinya bendera RIS yaitu bendera merah-putih. Selain itu, bahasa yang dijadikan sebagai bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya.

Hal lain yang menonjol dalam konferensi itu adalah munculnya rasa persaudaraan dan saling percaya antara pihak RI dan negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO. Konsensus yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia merupakan modal politik yang sangat besar dalam menghadapi Belanda di KMB.

KMB berlangsung sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Banyak persoalan yang harus dibicarakan dan disepakati dalam konferensi ini. Perdebatan-perdebatan sengit antara delegasi Indonesia-Belanda menyebabkan KMB berlangsung lama. Akan tetapi hal itu tidak terjadi antara delegasi RI dengan BFO karena keduanya telah mencapai kesepakatan-kesepakatan pada Konferensi Inter-Indonesia.

Ketika pembahasan mengenai konstitusi Negara Indonesia Serikat panitia kecil bidang konstitusi terbantu oleh hasil kerja panitia teknis yang dibentuk pada Konferensi Inter-Indonesia. Sebab panitia teknis telah menyusun draf konstitusi, sehingga dapat langsung dibahas dalam KMB. Pokok-pokok penting yang harus tercakup di dalamnya mengenai tata praja, susunan pemerintahan, perundang-undangan, dan lain-lain yang sudah disetujui sebelumnya dalam konferensi tersebut.

Pada 16 Desember 1949, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Setelah itu, Presiden Sukarno

menunjuk empat orang formatur untuk membentuk Kabinet RIS. Mereka adalah Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Anak Agung Gde Agung, dan Sultan Hamid II. Dalam hal ini masing-masing pihak (RI dan BFO) diwakili oleh dua formatur.

Semangat konsensus nasional yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia kembali muncul dalam Panitia Persiapan Nasional dan Penyusunan Kabinet RIS. Pada 20 Desember 1949, Presiden Sukarno melantik Kabinet RIS dengan komposisi yang memadukan antara RI dan BFO. Kedua belah pihak menyadari bahwa RIS yang berdaulat dan kokoh tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya konsensus bersama.

REFERENSI

- Agung, Ide Anak Agung Gde (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agung, Ide Anak Agung Gde (1991). *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Agung, Ide Anak Agung Gde (1994). *Pernyataan Rum-Van Roijen: 7 Mei 1949*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- ANRI, "Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949", No. 232.
- ANRI, "Arsip Moh. Yamin", No. 70.
- ANRI, "Arsip Sekretariat Negara 1945-1949", No. 850, 855, 1035.
- Kahin, George McTurnan (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Lapian, A.B. dan P. J. Drooglever (ed.) (1992). *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Leirissa, R. Z. (1985). *Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Leirissa, R. Z. (2006). *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Merdeka*, 18 Juli 1949.
- Merdeka*, 3 Agustus 1949.
- Mimbar Indonesia*, 12 Maret 1949.

- Notosusanto, Nugroho (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idaya.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan N. Notosusanto (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer, George dan D. J. Goodman (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roem, M. (1977). *Suka Duka Berunding dengan Belanda*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Sekretariat Negara RI (1981). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1975*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Sekretariat Umum KMB (1949). *Konperensi Medja Bundar: Kenyataan-Kenyataan dan Dokumen-Dokumen*. s-Gravenhage.
- Soemarsono, S. (1978). *Mohamad Roem 70 Tahun, Pejuang Perundingan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tobing, K. M. L. (1986). *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Gunung Agung.
- Vickers, A. (2013). *History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.